BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang transparan, jujur dan mampu mempertanggungjawabkan tugasnya dalam pengelolaan asset dan keuangan daerah. Dalam menjalankan fungsinya, pemerintah daerah harus berperan aktif dalam memajukan daerahnya lewat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang terutama menyangkut pengelolaan keuangan. Hal ini dapat tercermin lewat laporan keuangan yang disajikannya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara/daerah selama satu periode. Laporan keuangan dapat digunakan sebagai pedoman pengambilan keputusan bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya. Untuk mengukur baik buruknya suatu daerah salah satunya dapat diukur dari laporan keuangan daerah bersangkutan, laporan keuangan yang baik harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu dimana laporan keuangan harus relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan Negara di daerah, maka setiap tahunnya pihak-pihak yang bersangkutan dalam mengelola keuangan daerah menyiapkan laporan keuangan pemerintah daerah dan diperiksa oleh BPK. BPK adalah lembaga Negara yang dibentuk

berdasarkan UUD 1945 melakukan pemeriksaan salah satunya yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah, pemberian opini merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan, dimana BPK akan mengeluarkan opininya dari laporan keuangan yang diperiksanya, berdasarkan undang-undang no 15 tahun 2004 terdapat beberapa opini yang dikeluarkan oleh BPK yaitu :

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2. Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP)
3. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
4. Opini Tidak Wajar (TW)
5. Opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)

Dari beberapa opini yang dikeluarkan oleh BPK opini WTP merupakan opini tertinggi dari beberapa opini yang ada sehingga pemerintah daerah memiliki harapan dan berusaha memperoleh opini tersebut lewat pengelolaan keuangan yang disajikan dalam laporan keuangannya. Untuk meyakini bahwa laporan keuangan tidak terjadi salah saji material maka laporan keuangan yang disajikan harus memenuhi standar serta peraturan dan ketentuan yang ada.

Pada tahun 2014 BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap 34 LK Provinsi, 91 LK kota dan 417 LK kabupaten, namun tidak semua LKPD yang diperiksa oleh BPK, yang memperoleh opini dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yaitu hanya sebanyak 539 LKPD sedangkan 3 daerah lainnya tidak memperoleh opini dari BPK yaitu Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton

Tengah dan Kabupaten Muna Barat dimana 3 daerah tersebut merupakan daerah dari Provinsi Sulawesi Tenggara.

Di tahun 2014 dari 539 daerah yang memperoleh opini dari BPK namun nyatanya masih banyak daerah yang tidak memperoleh opini WTP hal ini dapat terlihat dari masih adanya daerah-daerah memperoleh opini Tidak Wajar (TW) dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas laporan keuangan yang disajikannya, dimana kedua oponi tersebut merupakan opini terendah dari semua jenis opini yang dikeluarkan oleh BPK. Hal ini harus menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah masing-masing dalam menyajikan LKPD, sebab salah satu kepercayaan publik atas entitas pemerintahan dapat di lihat lewat opini yang diperoleh oleh daerah dalam mengelola asset dan keuangan daerah.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester terlihat bahwa banyaknya opini yang dikeluarkan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah masing-masing daerah di tahun 2014 sebanyak 159 LKPD memperoleh opini WTP, 92 LKPD memperoleh opini WTP-DPP, 49 LKPD memperoleh opini WDP, 34 LKPD memperoleh opini TMP dan 5 LKPD memperoleh opini TW. 5 LKPD yang memperoleh opini TW yaitu Kabupaten Seluma, Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Pulau Taliabu,Kabupaten Lanny Jaya dan Kabupaten Niak Numfor.

Jika di lihat berdasarkan pembagian wilayah di Indonesia, Indonesia dapat dibagi menjadi tiga wilayah yaitu Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur. Mengacu pada daerah yang memperoleh opini Tidak Wajar (TW) di tahun 2014 jika di lihat berdasarkan pembagian wilayah maka opini wilayah yang masih memperoleh opini TW di tahun 2014 yaitu terletak pada

wilayah Bagian Barat dan Wilayah Bagian Timur. Pada Tahun 2015 pemeriksaan BPK terhadap LKPD meningkat yaitu bertambah sebanyak 3 LKPD dari tahun sebelumnya, kabupaten yang tidak memperoleh opini BPK di tahun 2014 pada tahun 2015 sudah memperoleh opini dari BPK sehingga menjadi 542 LKPD yang diperiksa oleh BPK.

Hasil opini audit yang dilakukan oleh BPK merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, sebab akan adanya ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh suatu daerah yang akan menentukan perolehan opini daerah tersebut. BPK memberikan rekomendasi sebagai upaya untuk perbaikan atas LKPD yang disajikan agar tiap-tiap daerah mampu menyajikan dengan baik dengan tujuan agar suatu daerah mampu memperoleh opini yang lebih baik.

Selain itu sebagai pengguna anggaran pencapaian opini terbaik harus mampu dicapai oleh setiap daerah, sebagaimana diungkapkan oleh anggota VI BPK saat pertemuan terakhir dengan presiden bahwa presiden menyatakan opini WTP sekarang diharapkan menjadi kewajiban bukan lagi tujuan. Dengan demikian, sangat pentingnya penyajian LKPD yang mengandung informasi keuangan sesuai standar yang berlaku. Hal ini harus mampu dijaga dan dilakukan oleh entitas sebagai upaya pertanggungjawaban anggaran negara yang transparan dan akuntabel.

Terkait hasil audit BPK atas LKPD jika dilihat secara keseluruhan opini BPK atas LKPD sudah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, berdasarkan olahan data persentase rata-rata kenaikan per tahun dari tahun 2014-2018 sudah

menunjukan banyak LKPD yang memperoleh angka positif baik itu dilihat menurut provinsi, kota dan kabupaten. Analisis terhadap opini Audit BPK atas LKPD perlu dilakukan agar dapat melihat bagaimana gambaran dan keadaan kinerja pemerintah lewat opini yang diperoleh oleh masing-masing daerah dan melihat sejauh mana perkembagan opini BPK tersebut di masing-masing daerah. Selain itu analisis yang dilakukan juga berguna bagi setiap daerah yaitu untuk menarik kepercayaan publik lewat opini yang diperolehnya.

Untuk melihat bagaimana perkembangan opini BPK atas LKPD berdasarkan uraian pada latar belakang, maka penelitian ini diberi judul "**Analisis Perkembangan Opini Audit BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten, Kota, dan Provinsi Se-Indonesia Tahun 2014-2018''**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Kabupaten mana yang memiliki perkembangan opini Audit BPK paling baik dan paling buruk dari tahun 2014-2018?
2. Kota mana yang memiliki perkembangan opini Audit BPK paling baik dan paling buruk dari tahun 2014-2018?
3. Provinsi mana yang memiliki perkembangan opini BPK paling baik dan paling buruk dari tahun 2014-2018?
4. Wilayah bagian mana yang memiliki perkembangan opini BPK paling baik dan paling buruk dari tahun 2014-2018?
5. Bagaimana perkembangan opini BPK atas LKPD dari tahun 2014-2018 secara keseluruhan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kabupaten mana yang memiliki perkembangan opini audit BPK paling baik dan paling buruk
2. Untuk mengetahui kota mana yang memiliki perkembangan opini audit BPK paling baik dan paling buruk
3. Untuk mengetahui provinsi mana yang memiliki perkembangan opini audit BPK paling baik dan paling buruk
4. Untuk mengetahui wilayah bagian mana yang memiliki perkembangan opini audit BPK paling baik dan paling buruk
5. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan opini BPK atas LKPD di Indonesia secara keseluruhan

1.4. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Pemerintah

   Diharapkan mampu memberikan gambaran dan masukan kepada pihak-pihak yang terkait di pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengelola keuangan daerah.

2. Bagi Penulis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai gambaran perkembangan opini BPK atas laporan keuangan pemrintah daerah serta penerapan ilmu selama kuliah.

3. Bagi Akademisi

Peneliti ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti dengan topik yang sama.

4. Bagi Investor

   Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur bagi investor dalam mengambil keputusan dan dapat menilai gambaran kinerja entitas pemerintahan.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab I adalah pendahuluan yang berisikan tentang gambaran secara umum mengenai isi penelitian mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Bab II adalah landasan teori yang menguraikan secara teoritis mulai dari komponen laporan keuangan pemerintah, karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah, jenis-jenis audit dan auditor, serta kriteria pemberian opini dan jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK pada laporan keuangan pemerintahan.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini membahas tentang metodologi penelitian yang berisikan desain penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan dan metode analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab IV memuat hasil penelitian dan pembahasan yang menggambarkan perkembangan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia tahun 2014-2018 , mulai dari perkembangan di tingkat kabupaten,kota, dan provinsi.

Bab V Penutup

Bab V adalah penutup berupa kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang diperlukan sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA